

## **Menjadi Presiden Untuk Sekedar Berkuasa**

*Ahmada Efendi, Ali Dachlan Center Jalan Dr. Soetomo 19 Karang Baru Mataram*

Munculnya beragam kritik dari netizen di berbagai platform media social terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) terus menaik. Seiring dengan itu bantahan-bantahan dari sisi pemerintah sendiri tidak segencar kritik-kritik netizen. Pada kasus MBG, di mana kritik-kritik itu datang dari semua lini, seperti air bah yang menenggelamkan ruang-ruang maya. Kritik-kritiknya ada yang konstruktif, berupa lelucon, sampai pada kritik yang keras.

MBG benar-benar babak belur dibikin oleh netizen. Apalagi setelah tiga jajaran ketua BGN-nya ditangkap. Kritik-kritik itu terus menghiasi di ruang publik. Belum lagi kasus korupsi ompong yang melibatkan Brigjen Lalu Iwan dari NTB, semakin membuat peluang besar bagi kritik-kritik yang memang tidak pernah surut. Kondisi ini membuat pihak-pihak BGN dan jajarannya ke bawah di daerah seperti tersudut. Mereka berusaha untuk membuat narasi positif mengenai program MBG, namun algaritmanya seperti tidak sekuat kritik-kritik dari netizen.

Baik dari kalangan elit seperti pimpinan-pimpinan Gerindra, DPR dengan jaringan partai-partainya, dan pihak-pihak SPPG maupun para relawannya mencoba hendak mempertahankan keberlanjutan MBG, namun sampai hari ini belum ada titik terang apa yang hendak berlaku ke depannya. Bahkan pihak pro MBG mencoba melakukan perlawanan demonstrasi untuk menandingi demo besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat agar ke depannya MBG dilanjutkan. Sebegitu gigihnya pihak pro MBG mempertahankan keberlanjutan MBG.

Padahal para penerima manfaat dari MBG relative tenang, hampir tidak ada reaksi besar untuk mempertahankan keberlanjutan MBG. Apalagi ketika hari libur sekolah, para siswa merasa tidak peduli dengan ada atau tidaknya MBG. Hal ini tentu menjadi semakin jelas siapa sebenarnya yang paling takut kehilangan MBG?

Kritik-kritik terhadap MBG sejauh ini memang sedikit banyak telah mampu membuka mata para pihak. Bahwa MBG tidak efektif dan membuat peluang korupsi elit dan jaringannya semakin membesar. Sedangkan dampak bagi penerima manfaat juga banyak bermasalah karena memang masalah makanan merupakan masalah yang sangat subjektif. Seorang suka belum tentu banyak orang suka. Seorang suka model suatu menu belum tentu banyak orang menyukai menu tersebut, sehingga membuat MBG terus-menerus menjadi kontroversi. Belum lagi masalah keracunan dan banyaknya makanan yang terbuang.

Masalahnya tidak berhenti pada masalah teknis tetapi juga bermasalah di bidang hukum, di mana MBG menyengol dana pendidikan. 20 persen dana APBN untuk pendidikan lalu dimasukkan item MBG, yang membuat 20 persen untuk operasional pendidikan semakin tersudut dan kewalahan. Akibatnya banyak guru honorer mengeluh karena tidak dibayarkan

gajinya. Gaji-gaji para pendidik belum dikategorikan layak sudah diganggu oleh MBG. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan belum selesai sudah diganggu MBG dan seterusnya.

Belum berhenti masalah MBG muncul juga kritik-kritik tajam dari netizen atas program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kritik-kritik ini juga seperti kritik-kritik untuk MBG, dijadikan bahan konten oleh para netizen. Kritik-kritiknya juga menyeruak dengan sangat intensif di berbagai platform media social. Dari yang berupa lelucon, satir sampai bernada ketus.

Sisi yang paling sering dikuliti dari KDMP adalah lokasi-lokasinya yang sering dibangun di tempat-tempat aneh. Lokasi-lokasi tempat dibangunnya yang mengambil tempat-tempat tidak/kurang wajar. KDMP dibangun di tengah sawah, di tengah hutan, di lereng gunung, bahkan ada yang bersinggungan dengan kuburan, sungai, tambak dan lain sebagainya.

Lokasi-lokasi KDMP tidak mencerminkan kelayakan usaha seperti akses penduduk. Secara logika siapa yang mau berbelanja ke tempat-tempat jauh, ke tempat-tempat sepi bahkan di lereng gunung? Logika ini seperti tidak jalan pada sisi pemerintah. Bangun dan bangun tanpa kelayakan studi terlebih dahulu membuat KDMP dibully terus-menerus oleh netizen. Alih-alih memberikan keyakinan pada kemampuan KDMP untuk berniaga malah membuat masyarakat mereasa “dibodohi”.

Belum lagi pada sisi barang-barang yang dijual. Pada bayangan warga isi KDMP berupa produk-produk UMKM, namun setelah diteliti lebih seksama, produk-produk yang dijual sama dengan yang di pasar modern lainnya. Lalu bagaimana mau menampung barang-barang UMKM?

Memperhatikan dari dua kasus kebijakan pemerintah, Nampak sekali arahnya pada pemberian manfaat pada pihak-pihak tertentu. Pemerintah sepertinya rela membodohi diri agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang memang diniatkan untuk mendapatkan. Program-programnya dijalankan, tanpa kematangan rencana dan studi membuat biaya-biaya yang dikeluarkan seperti sengaja untuk dihambur-hamburkan bagi pihak-pihak yang dikehendaki oleh rejim pemerintahan. Jikalau modelnya begini, maka menjadi pemerintah (presiden) tidak lebih sekedar hanya untuk berkuasa dan berkuasa, bukan untuk memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan bangsa dan Negara.